



Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung

Bilhaq Faizin Syukron¹, Alfian Ramdoni¹, Buyung Syukron^{2*}

¹Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

² UIN Jurai Siwo Lampung, Indonesia



*E-mail: buyung.syukron@metrouniv.ac.id

Artikel Info	Abstrak
Diterima 03 Juni 2026	Kemiskinan perkotaan di Kota Bandar Lampung mencapai 6,95% atau sekitar 84.400 jiwa pada Maret 2025, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 6,73%. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan pemberdayaan masyarakat yang terarah dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berbasis pertanian organik perkotaan serta mengkaji dampaknya terhadap kesejahteraan penerima manfaat di Kelurahan Kedaton. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan yang dipilih secara purposif, <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan anggota KUBE Gang Hijau, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, <i>member check</i>, serta <i>peer debriefing</i>. Analisis data menggunakan model interaktif Sugiyono (2019), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menjalankan tiga peran strategis sesuai dengan teori Suharto (2014), yaitu sebagai fasilitator melalui pemberian bantuan modal, pendampingan teknis, dan penguatan kelembagaan; sebagai mediator melalui penghubungan kelompok dengan instansi terkait dan penyelesaian konflik; serta sebagai dinamisator melalui penguatan motivasi dan partisipasi anggota. Program KUBE Gang Hijau memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, penguatan kohesi kelompok dan modal sosial, serta peningkatan kesejahteraan spiritual yang ditandai dengan rasa syukur, ketenangan batin, dan optimisme. Keberhasilan program dipengaruhi oleh konsistensi pendampingan pemerintah daerah dan kapasitas internal kelompok dalam mengelola kegiatan usaha. Kata kunci: <i>pemberdayaan masyarakat; Kelompok Usaha Bersama (KUBE); pemerintah daerah; kesejahteraan sosial</i>
Direvisi 05 September 2026	
Dipublikasi 27 September 2026	

Dipublikasikan oleh: Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm>

DOI: <https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i2.13880>

P-ISSN 2686-3839 dan E-ISSN 2686-4347

Volume 8 Nomor 2, Juli-Desember 2026

Tulisan ini bersifat akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional serta menjadi salah satu tantangan struktural Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kewajiban tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa penanganan fakir miskin merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan nasional menurun dari 10,19% pada September 2020 menjadi 8,47% pada Maret 2025. Namun, jumlah penduduk miskin masih berada pada kisaran 25 juta jiwa per tahun, sehingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi tantangan yang signifikan. Pada tingkat daerah, Kota Bandar Lampung memiliki persentase penduduk miskin sebesar 6,95% atau sekitar 84,40 ribu jiwa pada Maret 2025. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemiskinan perkotaan nasional sebesar 6,73%, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Tabel 1. Data Penduduk Miskin Indonesia Periode 2020–2025

Periode	Persentase Kemiskinan	Jumlah (Juta Jiwa)	Trend
September 2020	10,19%	27,55	—
September 2021	9,71%	26,50	▼ Turun
September 2022	9,57%	26,36	▼ Turun
Maret 2023	9,36%	25,90	▼ Turun
September 2024	8,57%	24,06	▼ Turun
Maret 2025	8,47%	23,85	▼ Turun

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Tabel 1 menunjukkan adanya tren penurunan tingkat kemiskinan secara konsisten selama lima tahun terakhir. Meskipun mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin secara absolut masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi kebijakan sosial, termasuk Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), tetap relevan sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Dalam menghadapi permasalahan kemiskinan perkotaan yang kompleks dan memiliki karakteristik yang beragam, pemberdayaan masyarakat melalui program ekonomi berbasis kelompok menjadi salah satu pendekatan kebijakan yang relevan. Salah satu program yang dikembangkan pemerintah adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang secara formal telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 dan selanjutnya diperkuat melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 yang menegaskan peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam fasilitasi dan pengawasan program. Pada tataran konseptual, KUBE tidak semata-mata diarahkan sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui dukungan permodalan dan pendampingan usaha (Ife & Tesoriero,

2014). Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan yang memiliki fungsi instrumental sekaligus nilai intrinsik dalam mendorong perubahan sosial yang bermartabat (Hamid, 2018; Adi, 2018; Narayan, 2002).

Sejumlah penelitian mengenai pelaksanaan KUBE di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam, sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan implementasinya. Setiawan et al. (2023) dan Permana et al. (2025) menunjukkan bahwa KUBE memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal, meskipun hasilnya belum merata. Sementara itu, Radiansyah et al. (2025) menemukan bahwa efektivitas program masih relatif rendah yang dipengaruhi oleh ketidaktepatan sasaran, keterbatasan pemahaman peserta, dan belum optimalnya manfaat yang dirasakan. Bahril (2017), Amalia et al. (2024), serta Yuliyanto dan Nugroho (2025) menegaskan bahwa keberhasilan KUBE dipengaruhi oleh optimalisasi peran pemerintah dalam memberikan pendampingan serta memastikan ketepatan sasaran. Di sisi lain, Agustina (2019) dan Huda (2013) mengidentifikasi sejumlah kendala, antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, penggunaan modal yang tidak sesuai peruntukan, serta lemahnya koordinasi antarpihak.

Dalam konteks Kota Bandar Lampung, Agustina (2019) menemukan adanya kesenjangan antara formulasi kebijakan dan pelaksanaan KUBE di lapangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan belum sepenuhnya menjamin tercapainya efektivitas pemberdayaan masyarakat miskin. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan dan implementasi program sehingga belum mengkaji secara mendalam hubungan antara peran pemerintah daerah dan kondisi kesejahteraan penerima manfaat secara multidimensional. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan menganalisis peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, mediator, dan dinamisor dalam pemberdayaan masyarakat melalui KUBE, serta mengkaji capaian kesejahteraan penerima manfaat berdasarkan perspektif kesejahteraan sosial multidimensional Adi (2018), yang meliputi dimensi material, sosial, dan spiritual.

Penelitian ini juga memiliki konteks empiris yang berbeda dengan mengambil objek KUBE Gang Hijau di Kelurahan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif tambahan dalam kajian KUBE karena tidak hanya menilai pelaksanaan program, tetapi juga menganalisis kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif. Urgensi penelitian semakin kuat mengingat penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui KUBE sekaligus memberikan rekomendasi bagi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, khususnya Dinas Sosial, dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program KUBE di Kelurahan Kedaton serta mengkaji dampaknya terhadap kesejahteraan penerima manfaat selama periode 2021–2026. Tingkat kesejahteraan dianalisis menggunakan perspektif kesejahteraan sosial multidimensional Adi (2018), yang mencakup tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan ekonomi (material), sosial, dan spiritual. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kesejahteraan sosial dan kebijakan publik, khususnya terkait implementasi program pemberdayaan ekonomi

bagi masyarakat miskin di wilayah perkotaan Indonesia. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memperluas diskursus akademik mengenai keterkaitan antara peran pemerintah daerah dan efektivitas program pemberdayaan berbasis kelompok sebagai instrumen kebijakan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan karakteristik lokal.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses pemberdayaan, pengalaman, serta persepsi penerima manfaat terhadap pelaksanaan program dan perubahan kesejahteraan yang dirasakan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat menggambarkan pelaksanaan KUBE dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dengan objek kajian berupa Program KUBE yang berada dalam pembinaan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian dipilih karena KUBE di wilayah tersebut masih aktif melaksanakan kegiatan usaha kelompok. Penelitian dilaksanakan pada 2025–2026 dengan periode kajian program pada 2021–2026.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian (Sugiyono, 2019). Pertimbangan pemilihan informan mencakup keterlibatan langsung, pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan KUBE dan perubahan kondisi kesejahteraan penerima manfaat. Informan penelitian terdiri atas empat kelompok, yaitu: (1) pihak Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, atau evaluasi KUBE dan memiliki pengalaman minimal satu tahun; (2) pendamping sosial/TKSK yang mendampingi KUBE di lokasi penelitian selama minimal satu tahun serta memahami perkembangan usaha dan dinamika kelompok; (3) pengurus dan anggota KUBE Gang Hijau sebagai penerima manfaat yang telah mengikuti kegiatan KUBE sekurang-kurangnya satu tahun; dan (4) tokoh masyarakat yang memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan KUBE di wilayah penelitian.

Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh perspektif yang beragam dari penyelenggara program, pendamping, penerima manfaat, dan masyarakat setempat. Keragaman perspektif ini diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan KUBE serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kedaton.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai *human instrument*, yang didukung oleh pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Indikator penelitian disusun berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah daerah, khususnya peran sebagai fasilitator, mediator, dan dinamisator dalam proses pemberdayaan. Sementara itu, kesejahteraan penerima manfaat dianalisis melalui aspek peningkatan ekonomi, partisipasi sosial, dan penguatan kesejahteraan sosial. Interpretasi data diperkuat oleh konsep pemberdayaan masyarakat Ife dan Tesoriero (2014) serta teori kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat Adi (2018).

Data primer diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu: (1) wawancara mendalam atau *in-depth interview* dengan 10 informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling*; (2) *Focus Group Discussion* (FGD) bersama anggota KUBE Gang Hijau; dan (3) observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan KUBE. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, meliputi dokumen regulasi, seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021, laporan pelaksanaan program Dinas Sosial, serta literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian.

Tabel 2. Kriteria dan Profil Informan Penelitian

Kode	Jabatan/Peran	Teknik	Tanggal
P	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos	Wawancara	5 Jan 2026
K	Pendamping KUBE Gang Hijau	Wawancara	30 Des 2025
D	Sekretaris KUBE Gang Hijau	Wawancara	22 Des 2025
R	Bendahara KUBE Gang Hijau	Wawancara	22 Des 2025
A	Ketua RT 004 Kelurahan Kedaton	Wawancara	21 Des 2025
F	Tokoh Masyarakat setempat	Wawancara	23 Des 2025
AL, S, N, NA, E, RO, M, RI, DI, PR	Anggota KUBE Gang Hijau	FGD	24 Des 2025

Sumber: Data Primer Penelitian

Keabsahan data diuji melalui beberapa teknik untuk memastikan kredibilitas dan keterpercayaan hasil penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Dinas Sosial, pendamping program, dan anggota KUBE, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mengonfirmasi kesesuaian data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti juga melakukan *member check* kepada informan utama untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi dengan informasi yang diberikan. Selain itu, *peer debriefing* dilakukan melalui diskusi dengan rekan akademik dan dosen pembimbing untuk memperoleh masukan terhadap proses analisis. Penerapan teknik tersebut bertujuan memastikan data yang diperoleh memiliki tingkat objektivitas, konsistensi, dan keterpercayaan yang memadai.

Analisis data dilakukan secara interaktif berdasarkan model Sugiyono (2019), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi dan identifikasi pola temuan. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan keterkaitan, pola, dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, analisis dilakukan secara interpretatif tanpa menggunakan perangkat lunak statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KUBE Gang Hijau Kedaton merupakan kelompok usaha masyarakat yang dibentuk pada masa pandemi COVID-19 sebagai respons bersama terhadap tekanan ekonomi yang dialami keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karakteristik utama kelompok ini terletak pada pengembangan usaha yang memadukan aspek ekonomi dan lingkungan melalui pertanian organik perkotaan (*urban organic farming*) dengan memanfaatkan lahan kosong milik warga tanpa penggunaan pestisida kimia. Produk yang dihasilkan meliputi sayuran organik, tanaman herbal, dan komoditas hortikultura yang dipasarkan melalui sistem *pre-order* menggunakan WhatsApp kepada jaringan komunitas lokal. Pola pemasaran tersebut membantu memperpendek rantai distribusi sekaligus memberikan peluang bagi anggota untuk memperoleh nilai jual yang lebih optimal. Temuan penelitian selanjutnya disajikan dalam dua aspek utama, yaitu peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui KUBE dan dampak program terhadap kesejahteraan penerima manfaat secara multidimensional.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui KUBE

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berperan dalam mendukung pelaksanaan KUBE Gang Hijau melalui tiga fungsi utama sebagaimana dikemukakan Suharto (2014), yaitu sebagai fasilitator, mediator, dan dinamisator. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dalam proses pemberdayaan dan berkontribusi terhadap penguatan kemandirian kelompok secara bertahap. Temuan ini sejalan dengan pandangan Ndraha (2011) bahwa efektivitas pemerintah daerah dalam pembangunan ditentukan oleh kemampuannya melaksanakan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pengaturan secara terpadu dan sinergis.

Peran Fasilitator

Sebagai fasilitator, Dinas Sosial menjalankan perannya melalui tiga bentuk utama yang dilakukan secara berkelanjutan. Pertama, penyaluran bantuan berupa modal usaha dan peralatan pertanian organik sebagai dukungan awal bagi pelaksanaan kegiatan usaha kelompok. Kedua, pemberian pendampingan teknis melalui fasilitasi pelatihan pertanian organik yang melibatkan Dinas Pertanian, pembinaan dalam pengelolaan keuangan kelompok, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Ketiga, pelaksanaan pemantauan kegiatan usaha secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Informan P):

"Bentuk KUBE yang berlaku di sini tidak hanya memberikan bantuan modal usaha saja, tetapi juga dari kami melakukan pendampingan dan pembinaan agar kelompok KUBE mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Kami memfasilitasi mulai dari pembentukan kelompok, pendampingan, hingga monitoring kegiatan usaha." (Informan P, 5 Januari 2026)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah melaksanakan fungsi fasilitator secara konsisten melalui pemberian bantuan modal usaha dan peralatan pertanian, pendampingan berkelanjutan, pembinaan teknis, penguatan kelembagaan, serta pemantauan kegiatan usaha. Fasilitasi tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga menerapkan pendekatan partisipatif dan edukatif. Anggota KUBE ditempatkan tidak semata-mata sebagai penerima manfaat (*beneficiary*), tetapi juga sebagai pelaku yang terlibat dalam penyusunan rencana usaha, pembagian tugas, dan pengambilan keputusan kelompok.

Praktik tersebut mencerminkan prinsip *enabling* dan *empowering* dalam teori pemberdayaan Ife dan Tesoriero (2014), yang menempatkan fasilitator sebagai pihak yang membantu memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya tanpa mengambil alih kewenangan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Pertanian menunjukkan adanya pola fasilitasi berbasis jejaring kelembagaan yang melibatkan lintas sektor. Temuan ini sejalan dengan Setiawan et al. (2023) dan Permana et al. (2025) yang menunjukkan bahwa KUBE dapat mendorong pengembangan peluang ekonomi berbasis potensi lokal apabila didukung fasilitasi pemerintah yang edukatif dan terkoordinasi.

Peran Mediator

Selain sebagai fasilitator, pemerintah daerah menjalankan fungsi mediator dalam menangani dinamika internal kelompok serta membangun hubungan antara masyarakat dan pihak eksternal. Dinas Sosial berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara anggota KUBE, pendamping, dan lembaga terkait agar pelaksanaan program dapat berlangsung secara kolektif dan partisipatif. Peran tersebut menjadi penting mengingat kegiatan usaha kelompok dapat menghadapi perbedaan kepentingan, kapasitas anggota, maupun persoalan dalam pengelolaan modal usaha.

Fungsi mediasi Dinas Sosial diwujudkan melalui dua ranah yang saling berkaitan. Pada ranah eksternal, Dinas Sosial menghubungkan KUBE Gang Hijau dengan berbagai pihak yang relevan, seperti Dinas Pertanian untuk memperoleh dukungan teknis, lembaga pelatihan kewirausahaan, serta jejaring pemasaran berbasis komunitas. Salah satu bentuknya adalah fasilitasi seminar pemasaran produk organik bersama Dinas Pertanian, sebagaimana disampaikan oleh pendamping KUBE (Informan K). Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi mediator tidak hanya bersifat responsif terhadap kebutuhan kelompok, tetapi juga proaktif dalam membuka akses terhadap sumber daya dan jaringan eksternal.

Pada ranah internal, Dinas Sosial turut memfasilitasi penyelesaian perbedaan pendapat yang muncul di antara anggota sebagai bagian dari dinamika kelompok usaha. Peran tersebut diarahkan untuk menjaga komunikasi, memperkuat kerja sama, dan mempertahankan keberlangsungan kegiatan kelompok. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris KUBE (Informan D):

"Kadang kita yang harus mengajuin dulu dan itu juga tidak semua persoalan dapat langsung bisa terselesaikan secara cepat, karena proses mediasi sering bergantung pada kesiapan masing-masing pihak." (Informan D, 22 Desember 2025)

Pernyataan informan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi mediasi masih menghadapi keterbatasan struktural. Di lapangan, mediasi cenderung dilakukan secara reaktif, yaitu setelah konflik atau permasalahan muncul, dan belum sepenuhnya diarahkan pada upaya preventif. Dalam perspektif Suharto (2014), mediasi preventif dapat dilakukan melalui mekanisme komunikasi yang terstruktur, seperti forum evaluasi berkala dan mekanisme penyelesaian konflik yang dapat berfungsi sebagai sistem deteksi dini. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi mediasi yang bersifat reaktif tetap berperan dalam menjaga stabilitas hubungan antaranggota dan mendukung keberlanjutan kegiatan kelompok. Temuan ini sejalan dengan Huda (2013) yang menegaskan bahwa keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun koordinasi lintas sektor serta memperkuat kohesi kelembagaan kelompok.

Peran Dinamisor

Pemerintah daerah turut menjalankan fungsi sebagai dinamisor melalui pemberian motivasi, peningkatan partisipasi anggota, dan penguatan keberlanjutan kegiatan usaha kelompok. Pendampingan yang diberikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan kemandirian masyarakat melalui kerja sama kelompok. Kehadiran pemerintah dalam proses pemberdayaan memberikan dukungan psikologis dan sosial yang mendorong anggota untuk mempertahankan keterlibatan dalam kegiatan usaha produktif.

Dibandingkan dengan dua fungsi lainnya, peran dinamisor memiliki dimensi yang lebih transformatif, meskipun relatif sulit diukur secara kuantitatif. Dinas Sosial bersama pendamping KUBE menjalankan fungsi tersebut melalui pemberian motivasi secara berkelanjutan, penguatan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap kelompok, serta peningkatan partisipasi anggota dalam berbagai tahapan kegiatan usaha. Pendampingan tidak hanya dilakukan melalui pemberian arahan, tetapi juga pendekatan persuasif yang mendorong anggota memahami bahwa keberhasilan kelompok merupakan hasil dari kerja kolektif dan tanggung jawab bersama. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bendahara KUBE (Informan R):

"Melalui pendampingan itu juga, kami tidak hanya belajar mengelola tanaman tetapi juga belajar usaha bersama dan bekerja sama dalam kelompok."
(Informan R, 22 Desember 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya proses pembelajaran sosial dalam pelaksanaan KUBE. Pendampingan tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis anggota mengenai pertanian organik, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas sosial, seperti kemampuan bekerja sama, mengelola perbedaan, dan memperkuat solidaritas kelompok. Temuan ini sejalan dengan pandangan Adi (2018) yang menempatkan pemerintah sebagai salah satu aktor dalam pengembangan kapasitas sosial masyarakat melalui penguatan partisipasi dan pengorganisasian komunitas.

Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa motivasi anggota masih bersifat fluktuatif dan belum sepenuhnya berkembang menjadi dorongan internal yang mandiri. Intensitas partisipasi anggota cenderung menurun ketika frekuensi pendampingan berkurang. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan kepemimpinan internal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian kelompok. Temuan ini sejalan dengan Amalia et al. (2024) dan Pramudyastuti et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberlanjutan KUBE dalam jangka panjang memerlukan proses transisi dari ketergantungan terhadap pendamping eksternal menuju penguatan otonomi dan kepemimpinan internal kelompok.

Tabel 3. Ringkasan Peran Pemerintah Daerah dalam Program KUBE

Dimensi Peran	Bentuk Implementasi	Capaian	Keterbatasan
Fasilitator	Bantuan modal usaha; peralatan pertanian organik; pendampingan teknis; monitoring berkala	Anggota berperan aktif sebagai subjek pemberdayaan; usaha berjalan mandiri	Keterbatasan jumlah dan waktu pendamping lapangan
Mediator	Koordinasi lintas sektor	Dari hasil wawancara	Mediasi bersifat

	(Dinas Pertanian); seminar pemasaran; resolusi konflik internal	menunjukkan bahwa akses kelompok ke sumber daya eksternal semakin terbuka melalui jejaring yang dibangun secara kolektif.	reaktif; belum ada mekanisme pencegahan konflik preventif
Dinamisator	Pemberian motivasi berkelanjutan; penguatan <i>sense of belonging</i> ; pendampingan persuasif	Kohesi kelompok meningkat; partisipasi aktif anggota tumbuh	Motivasi fluktuatif; partisipasi bergantung pada intensitas pendamping eksternal

Sumber: Analisis Data Primer Penelitian

Dampak KUBE terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dampak Program KUBE Gang Hijau dianalisis menggunakan perspektif kesejahteraan sosial multidimensional yang mencakup tiga aspek, yaitu kesejahteraan ekonomi (material), sosial, dan spiritual. Kerangka analisis tersebut mengacu pada konsep Adi (2018) yang memandang kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sosial, dan spiritual sehingga individu mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Penggunaan kerangka multidimensional ini memungkinkan penelitian memberikan analisis yang lebih komprehensif karena tidak hanya menilai keberhasilan program berdasarkan perubahan kondisi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan spiritual penerima manfaat.

Dampak Terhadap Kesejahteraan Material (Ekonomi)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KUBE memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat di Kelurahan Kedaton. Dampak tersebut tercermin dalam peningkatan kegiatan usaha produktif, bertambahnya sumber pendapatan rumah tangga, serta meningkatnya kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, program ini memberikan peluang ekonomi baru dan mendorong anggota untuk mengembangkan kemandirian dalam menjalankan kegiatan usaha.

Sebelum bergabung dengan KUBE Gang Hijau, sebagian besar anggota belum memiliki sumber pendapatan mandiri dan masih bergantung secara finansial pada kepala keluarga. Keikutsertaan dalam program memberikan perubahan berupa tambahan pendapatan dari penjualan produk pertanian organik. Pengalaman tersebut juga mendorong sebagian anggota untuk mengembangkan usaha secara mandiri di luar kegiatan KUBE. Salah satu anggota (Informan RI) menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam KUBE mendorongnya membuka usaha kecil dari rumah sebagai sumber pendapatan tambahan bagi keluarga.

Secara analitis, dampak ekonomi KUBE Gang Hijau dapat dilihat melalui tiga indikator kesejahteraan menurut Todaro dan Smith (2015), yaitu peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan relatif, dan perluasan kesempatan kerja. Pertama, peningkatan pendapatan ditunjukkan melalui tambahan penghasilan dari penjualan produk organik dengan sistem *pre-order* yang memberikan kepastian pasar sebelum masa panen. Kedua, pengurangan kemiskinan relatif terlihat dari meningkatnya kemampuan anggota memenuhi kebutuhan dasar secara lebih mandiri sehingga ketergantungan finansial dapat berkurang. Ketiga, perluasan kesempatan kerja

tercermin dari munculnya peluang usaha baru melalui jejaring yang terbentuk selama pelaksanaan KUBE. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Informan E:

“Kalau saya sekarang memang sangat kerasa, dek. Dengan adanya KUBE ini, kondisi ekonomi saya jauh lebih terbantu dibanding sebelumnya. Dulu penghasilan pas-pasan, kadang habis buat kebutuhan sehari-hari saja, jadi nggak kepikiran bisa nabung. Tapi setelah ikut KUBE walaupun hasilnya tidak besar, tapi ada pemasukan tambahan yang rutin. Dari situ saya bisa sedikit-sedikit nabung. Jadi sekarang saya sudah bisa buat buka usaha kecil-kecilan di rumah. Awalnya dari pengalaman ikut KUBE, jadi lebih berani dan percaya diri. Saya belajar ngatur uang, misahin antara modal sama keuntungan, terus pelan-pelan coba jualan sendiri. Walaupun masih sederhana, tapi sangat membantu, apalagi buat nambah penghasilan keluarga.kalo saya sekarang sangat kerasa dek.” (Informan E, FGD 24 Desember 2025)



Gambar 1. Dampak Peningkatan Ekonomi Melalui KUBE

Temuan penelitian sejalan dengan konsep kesejahteraan material Adi (2018) yang memandang kesejahteraan tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tetapi juga kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Pengalaman informan dalam mengelola keuangan usaha, seperti membedakan modal dan keuntungan serta keberanian mengembangkan usaha secara mandiri, menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi. Dalam perspektif pembangunan Todaro dan Smith (2015), kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak semata berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada perluasan kemampuan (*capabilities*) dan pilihan hidup individu.

Keberlanjutan manfaat ekonomi sejak pembentukan kelompok pada masa pandemi COVID-19 hingga saat ini menunjukkan bahwa KUBE Gang Hijau telah berkembang melampaui pola bantuan karitatif jangka pendek menuju pendekatan pemberdayaan yang memperkuat kapasitas ekonomi anggota. Temuan ini mendukung penelitian Bahril (2017) serta Yuliyanto dan Nugroho (2025) yang menyatakan bahwa KUBE dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi apabila dilaksanakan secara tepat sasaran dan didukung pendampingan yang memadai.

Meskipun demikian, penelitian masih menemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan modal yang belum optimal, serta ketergantungan sebagian anggota terhadap bantuan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan penguatan kapasitas secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan Agustina (2019) yang

mengidentifikasi rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola bantuan usaha secara kolektif sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat efektivitas KUBE.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi melalui KUBE berkaitan erat dengan kualitas pendampingan dan kemampuan anggota dalam membangun kemandirian usaha. Pemberian bantuan ekonomi tanpa diikuti penguatan kapasitas berpotensi menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, keberlanjutan program memerlukan integrasi antara dukungan permodalan, pembinaan, dan penguatan partisipasi masyarakat.

Dampak KUBE terhadap Kesejahteraan Sosial

Selain memberikan manfaat ekonomi, KUBE Gang Hijau juga berkembang sebagai ruang interaksi sosial yang berperan penting bagi anggotanya. Pertemuan rutin, kegiatan usaha bersama, dan diskusi informal berkontribusi terhadap terbentuknya hubungan sosial yang lebih erat di antara anggota yang sebelumnya memiliki intensitas interaksi terbatas. Pendamping KUBE (Informan K) menyatakan bahwa kekompakan dan kualitas hubungan antaranggota menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan kegiatan usaha kelompok.

Temuan tersebut dapat dianalisis melalui konsep *social capital* Putnam (2000), yang menjelaskan bahwa jaringan sosial, norma bersama, dan kepercayaan dapat memperkuat kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan kolektif. Dalam konteks KUBE Gang Hijau, modal sosial tercermin dalam tiga bentuk. Pertama, penguatan *bonding social capital* melalui meningkatnya solidaritas dan kepercayaan antaranggota. Kedua, terbentuknya norma kolektif yang mendorong tanggung jawab bersama dalam pengelolaan kegiatan usaha. Ketiga, meningkatnya kepercayaan anggota terhadap pihak pendamping dan institusi yang terlibat dalam program. Perubahan tersebut juga terlihat dari meningkatnya keterlibatan anggota yang sebelumnya kurang aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan Kelurahan Kedaton. Temuan ini sejalan dengan Auliyazahra dan Mulyono (2024) yang menunjukkan bahwa KUBE tidak hanya berfungsi sebagai wadah kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat berperan dalam membentuk dan memperkuat identitas sosial kolektif masyarakat.

Dampak KUBE terhadap Kesejahteraan Spiritual

Penelitian juga mengidentifikasi adanya perubahan yang dirasakan anggota pada dimensi kesejahteraan spiritual setelah mengikuti kegiatan KUBE. Dalam penelitian ini, kesejahteraan spiritual tidak dibatasi pada aspek ritual keagamaan, tetapi dipahami sebagai pengalaman subjektif yang mencakup kebermaknaan hidup, ketenangan batin, penerimaan terhadap kondisi kehidupan, serta tumbuhnya sikap optimistik. Pemaknaan tersebut didasarkan pada pengalaman dan persepsi informan yang diperoleh melalui wawancara dan FGD. Oleh karena itu, temuan mengenai kesejahteraan spiritual bersifat perseptual dan tidak didasarkan pada pengukuran psikometrik atau skala statistik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan mengukur tingkat kesejahteraan spiritual anggota secara kuantitatif, melainkan mendeskripsikan cara anggota memaknai perubahan yang mereka rasakan setelah terlibat dalam kegiatan KUBE. Sebelum bergabung dengan KUBE, beberapa anggota menggambarkan kehidupannya sebagai kurang produktif, dengan keterbatasan aktivitas sehari-hari dan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi. Keterlibatan dalam KUBE kemudian memberikan kesempatan bagi anggota untuk beraktivitas bersama, memperoleh pengalaman baru, serta menjalankan kegiatan yang dipandang memiliki

makna bagi kehidupan mereka. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu peserta FGD (Informan NA):

"Sekarang saya lebih sering bersyukur. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa, sekarang jadi disyukuri. Ada pemasukan walaupun sedikit, ada teman buat kerja bareng, ada kegiatan yang bikin hati tidak kosong." (Informan NA, FGD, 24 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan dalam KUBE tidak hanya dipersepsikan melalui manfaat ekonomi berupa tambahan pendapatan, tetapi juga melalui tumbuhnya rasa syukur, kebersamaan, dan aktivitas yang memberikan makna dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini diperkuat oleh keterangan Informan S yang menyatakan bahwa keterlibatan dalam kegiatan kelompok memberikan aktivitas yang produktif sekaligus membuka ruang interaksi dan kebersamaan dengan anggota lainnya.

"Kalau di kelompok ini kan sering saling ngingetin, bukan cuma soal usaha, tapi juga soal sabar dan doa. Jadi kalau ada yang lagi down, kita saling nguatin. Kalau dibandingin sama dulu, sekarang kami lebih ngerasa tenang dan nggak gampang ngeluh. Memang secara ekonomi belum bisa dibilang mapan, tapi ngerasa hidupnya lebih berarti. Lewat KUBE ini, kami jadi sering kumpul, saling cerita, dan saling ngingetin. Dari situ muncul rasa kebersamaan dan saling menguatkan". (Informan S, FGD, 24 Desember 2025).

Sementara itu, (informan K) selaku pendamping KUBE menyatakan *"Yang paling kelihatan itu secara mentalnya. Dibandingkan dulu mereka sekarang lebih percaya diri dan nggak gampang menyerah. Dan sekarang mereka itu selalu optimis dan yakin kalau mereka itu mampu, asal mau bergerak dan berproses sebagai ikhtiar dan sisanya diserahkan kepada yang maha kuasa."* Kedua keterangan tersebut penting untuk menunjukkan bahwa temuan mengenai dimensi spiritual tidak hanya bersumber dari satu pengalaman individual, tetapi muncul melalui pola pengalaman yang ditemukan pada beberapa informan.

Pernyataan Informan NA dan S mengindikasikan tiga aspek kesejahteraan spiritual yang dapat dianalisis. Pertama, perubahan orientasi kognitif, yaitu pergeseran dari fokus terhadap keterbatasan menuju kemampuan memaknai dan mengapresiasi pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, aspek relasional, yang terlihat dari terbentuknya interaksi dan dukungan emosional melalui aktivitas bersama sehingga dapat mengurangi perasaan terisolasi. Ketiga, keberadaan aktivitas yang bermakna, ketika kegiatan rutin KUBE memberikan kesempatan anggota untuk tetap produktif dan mengisi aktivitas keseharian secara lebih positif.

Temuan tersebut dapat dianalisis melalui *Self-Determination Theory* yang dikembangkan Ryan dan Deci (2000), khususnya mengenai tiga kebutuhan psikologis dasar, yaitu *competence*, *relatedness*, dan *autonomy*. Kegiatan KUBE memberikan ruang bagi anggota untuk mengembangkan keterampilan dan pengalaman dalam menjalankan usaha (*competence*), membangun hubungan sosial dan rasa kebersamaan dalam kelompok (*relatedness*), serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan (*autonomy*). Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan sebagai perspektif analitis untuk memahami pengalaman informan dan tidak dimaksudkan untuk membuktikan peningkatan kesejahteraan psikologis secara kuantitatif.

Dengan demikian, temuan mengenai dimensi spiritual perlu dipahami secara proporsional. Penelitian ini tidak melakukan pengukuran kesejahteraan spiritual sebelum dan sesudah program menggunakan instrumen psikometrik, sehingga tidak dapat menyimpulkan adanya peningkatan secara statistik. Temuan yang dapat ditegaskan adalah adanya persepsi anggota mengenai perubahan positif dalam memaknai kehidupan, rasa syukur, ketenangan, kebersamaan, dan kebermaknaan aktivitas setelah mengikuti KUBE. Dimensi tersebut memperluas pemahaman mengenai kesejahteraan penerima manfaat yang tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga pengalaman sosial dan subjektif dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 4. Matriks Dampak Multidimensional Program KUBE Gang Hijau

Dimensi	Indikator Perubahan	Kondisi Sebelum KUBE	Kondisi Setelah KUBE
Ekonomi (Material)	Pendapatan, kesempatan kerja, ketahanan ekonomi	Tidak ada pendapatan mandiri; bergantung sepenuhnya pada kepala keluarga	Ada tambahan pendapatan rutin; mulai menabung dan merintis usaha mandiri
Sosial	Kohesi sosial, modal sosial, partisipasi komunitas	Interaksi sosial terbatas; kurang aktif di komunitas	Hubungan sosial lebih erat; solidaritas meningkat; aktif berpartisipasi
Spiritual	Ketenangan batin, rasa syukur, optimisme, resiliensi	Cemas, mudah putus asa, merasa hidup tanpa tujuan	Lebih tenang, ikhlas, bersyukur; memiliki harapan dan makna hidup

Sumber: Sintesis Wawancara dan FGD

Interpretasi dan Makna Temuan Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa KUBE Gang Hijau tidak hanya berfungsi sebagai program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan pada aspek ekonomi, sosial, dan spiritual penerima manfaat. Pada aspek ekonomi, perubahan terlihat dari peningkatan kapasitas produktif dan pendapatan rumah tangga. Pada aspek sosial, program berkontribusi terhadap penguatan kepercayaan, solidaritas, dan interaksi antaranggota. Sementara itu, pada aspek spiritual, anggota mempersepsikan adanya peningkatan kebermaknaan aktivitas, rasa syukur, optimisme, dan kemampuan menghadapi kondisi kehidupan. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dalam membentuk kondisi kesejahteraan yang lebih komprehensif. Peningkatan kondisi ekonomi, misalnya, dapat mendukung kepercayaan diri dalam berinteraksi, sementara hubungan sosial yang semakin kuat turut memberikan pengalaman kebersamaan dan kebermaknaan bagi anggota. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis KUBE yang disertai pendampingan berkelanjutan memiliki potensi menghasilkan manfaat yang lebih luas dibandingkan pemberian bantuan ekonomi semata.

Capaian tersebut tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dalam menjalankan fungsi fasilitator, mediator, dan dinamisator. Fungsi fasilitator diwujudkan melalui perluasan akses terhadap sumber daya dan dukungan program, fungsi mediator melalui pengelolaan hubungan serta dinamika kelompok, sedangkan fungsi dinamisator melalui

penguatan motivasi dan partisipasi anggota. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keberlanjutan pemberdayaan melalui KUBE sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan keterpaduan pendampingan pemerintah. Tanpa pendampingan yang memadai, modal sosial kelompok berpotensi melemah, partisipasi anggota dapat menurun, dan keberlangsungan usaha menjadi kurang terjamin setelah dukungan awal berakhir. Kondisi tersebut sejalan dengan Agustina (2019) yang menemukan adanya hambatan keberlanjutan KUBE dalam konteks Kecamatan Rajabasa. Sebaliknya, keterlibatan pemerintah yang konsisten melalui fungsi fasilitasi, mediasi, dan dinamisasi dapat mendukung proses penguatan kemandirian kelompok secara bertahap serta mengurangi potensi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Dalam kajian nasional mengenai implementasi KUBE, penelitian ini memiliki fokus yang relatif berbeda. Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak menilai efektivitas program berdasarkan capaian ekonomi (Setiawan et al., 2023; Radiansyah et al., 2025; Yuliyanto dan Nugroho, 2025), sedangkan penelitian ini menganalisis kesejahteraan penerima manfaat melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu ekonomi, sosial, dan spiritual, sekaligus mengkaji peran pemerintah daerah dalam proses pemberdayaan. Selain itu, penerapan KUBE melalui model pertanian organik perkotaan (*urban organic farming*) menjadi konteks empiris yang memberikan perspektif tambahan dalam kajian KUBE di Indonesia. Model tersebut menunjukkan potensi pemanfaatan sumber daya dan kondisi lingkungan perkotaan sebagai bagian dari pengembangan usaha kelompok. Secara teoretis, temuan penelitian memperkuat pandangan bahwa dampak program pemberdayaan masyarakat perlu dipahami secara multidimensional dan tidak hanya didasarkan pada indikator ekonomi.

Temuan penelitian memiliki beberapa implikasi bagi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan pemangku kepentingan di tingkat daerah. Pertama, mekanisme pendampingan KUBE perlu diperkuat melalui penerapan mediasi preventif, seperti evaluasi kelompok secara berkala dan mekanisme penyelesaian konflik yang terstruktur. Kedua, penguatan kapasitas kepemimpinan internal perlu menjadi bagian dari pendampingan agar keberlangsungan motivasi dan partisipasi anggota tidak sepenuhnya bergantung pada pendamping eksternal. Ketiga, indikator evaluasi program perlu mencakup aspek yang lebih luas, tidak hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga kohesi sosial, partisipasi anggota, dan pengalaman kesejahteraan penerima manfaat. Keempat, model pertanian organik perkotaan yang diterapkan KUBE Gang Hijau dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif pengembangan KUBE di wilayah perkotaan lain yang memiliki keterbatasan lahan dan potensi sosial masyarakat yang serupa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam memahami hasil penelitian. Penggunaan desain studi kasus tunggal pada satu kelurahan dengan pendekatan kualitatif menyebabkan temuan penelitian tidak ditujukan untuk generalisasi statistik terhadap seluruh pelaksanaan KUBE di Kota Bandar Lampung maupun wilayah lainnya. Selain itu, penelitian belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap perubahan pendapatan dan tingkat kesejahteraan penerima manfaat, sehingga informasi mengenai perubahan ekonomi didasarkan pada pengalaman dan persepsi informan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan mengombinasikan pengukuran kuantitatif mengenai perubahan pendapatan dan kesejahteraan dengan eksplorasi kualitatif terhadap dinamika sosial dan spiritual kelompok. Perbandingan pelaksanaan KUBE pada beberapa kelurahan atau daerah juga dapat dilakukan untuk memperkuat generalisasi analitik dan memperluas pemahaman mengenai faktor yang memengaruhi keberhasilan program.

Tabel 5. Matriks Kontribusi dan Implikasi Kebijakan Penelitian

Dimensi Kontribusi	Uraian	Implikasi Praktis
Teoritis	Mengintegrasikan tiga dimensi kesejahteraan (ekonomi, sosial, spiritual) dalam satu kerangka analisis tunggal—melengkapi literatur KUBE yang umumnya hanya mengkaji dimensi ekonomi	Memperluas indikator keberhasilan KUBE melebihi ukuran peningkatan pendapatan semata
Empiris	Menyajikan bukti bahwa peran Pemda (fasilitator – mediator – dinamisor) merupakan variabel penentu, bukan sekadar pendukung dalam keberhasilan KUBE	Dinas Sosial perlu memastikan pendampingan yang konsisten, bukan hanya pada fase awal program
Metodologis	Menggunakan studi kasus tunggal dengan triangulasi sumber, teknik, member check, dan peer debriefing sebagai strategi keabsahan data yang ketat	Penelitian lanjutan disarankan menggunakan mixed methods untuk mengukur dampak secara kuantitatif
Kebijakan	Mengidentifikasi empat implikasi kebijakan konkret: mediasi preventif, pelatihan kepemimpinan internal, perluasan indikator monitoring, dan replikasi model pertanian organik perkotaan	Dapat menjadi rujukan bagi Dinas Sosial dalam merancang program KUBE generasi berikutnya yang lebih adaptif dan berkelanjutan

Sumber: Sintesis Analisis dan Temuan Penelitian

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial menjalankan peran dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Kedaton sebagai fasilitator, mediator, dan dinamisor. Peran tersebut diwujudkan melalui dukungan usaha, pendampingan, penguatan kapasitas kelompok, fasilitasi akses dan koordinasi dengan pihak terkait, serta penguatan motivasi anggota. Pelaksanaan KUBE Gang Hijau juga menunjukkan perubahan yang dirasakan anggota pada beberapa dimensi kesejahteraan. Pada aspek ekonomi, perubahan terlihat melalui peningkatan keterampilan dan tambahan pendapatan; pada aspek sosial, melalui penguatan interaksi dan solidaritas kelompok; sedangkan pada aspek spiritual, melalui tumbuhnya rasa syukur, optimisme, dan penerimaan terhadap kondisi kehidupan. Dengan demikian, KUBE tidak hanya berperan sebagai bentuk dukungan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat melalui proses kolektif berbasis kelompok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, pendamping Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pengurus dan anggota KUBE Gang Hijau Kelurahan Kedaton, serta seluruh informan yang telah memberikan waktu, informasi, dan dukungan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta atas dukungan akademik yang diberikan selama pelaksanaan penelitian. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta penguatan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

PENYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

BFS berkontribusi dalam konseptualisasi dan perancangan penelitian, pengumpulan dan analisis data, interpretasi hasil, penyusunan draf naskah, serta revisi akhir artikel. AF berkontribusi dalam supervisi penelitian, pengembangan kerangka teoretis, validasi analisis data, penelaahan kritis substansi naskah, serta penyempurnaan naskah. BS berkontribusi dalam supervisi penelitian, validasi hasil dan analisis data, penelaahan kritis substansi naskah, serta penyempurnaan dan persetujuan akhir naskah untuk publikasi. Seluruh penulis telah membaca, menyetujui, dan bertanggung jawab atas versi akhir naskah.

REFERENSI

- Adi, I. R. (2018). *Kesejahteraan sosial: Pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustina, R. (2019). Kebijakan Pemda Kota Bandar Lampung tentang pemberdayaan masyarakat miskin (Studi penelitian pada penanggulangan kemiskinan melalui model Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Amalia, D., Lestari, A. K., & Sukmawati, L. (2024). Efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui program kewirausahaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 5(1), 29–38. <https://doi.org/10.46730/japs.v5i1.122>
- Auliyazahra, A., & Mulyono, S. E. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui produksi batik Pring Sedapur di KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Mukti Rahayu Kabupaten Magetan. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(3), 214–224. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i3.740>
- Bahril, S. A. (2017). Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Alauddin Makassar.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2014). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalization* (4th ed.). Pearson Education.
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and poverty reduction: A sourcebook*. Washington, DC: The World Bank.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Permana, W. E., Putri, R. A., Wulandari, R., Putri, Y. A., Santiani, Hudaeri, Sabrina, H. G., Sari, D. R., Rizki, K., Taufikurrahman, & Sulaimiah. (2025). Pemberdayaan masyarakat pengusaha minyak kelapa melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Wicara Desa*, 3(1), 149–158. <https://doi.org/10.29303/wicara.v3i1.6744>
- Pramudyastuti, O. L., Panggiarti, E. K., Nugraheni, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2025). Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) “Mekar” dalam rangka penguatan perekonomian masyarakat di Kelurahan Potrobangsari Kota Magelang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 4(1), 150–161. <https://doi.org/10.36490/jpmtnd.v4i1.1680>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Radiansyah, R. R., Karnita, & Septiansyah, B. (2025). Efektivitas program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ternak domba oleh Dinas Sosial dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Bojongkunci Kabupaten Bandung. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 13(1), 39–57. <https://doi.org/10.34010/ccf3zp49>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Setiawan, R., Siregar, P., & Suhartini. (2023). Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama. *Jurnal Dwija Kusuma*, 11(1), 30–47. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2019). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Yayasan Mitra Netra.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. New York: Pearson Education.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. JDIH BPK.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. JDIH BPK.
- Yuliyanto, R., & Nugroho, H. S. (2025). Program usaha ekonomi produktif Kelompok Usaha Bersama melalui Kelompok Usaha Bersama Lestari Budaya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 11(1), 82–104. <https://doi.org/10.37058/jipp.v11i1.13162>